

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2024). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Alamri, M. S. (2025). *pemberian izin pertambangan rakyat bagi pemilik tanah yang menambang didalam tanah milik pribadi dan bagaimana peran pemerintah atau penegakan hukum terkait dengan kebijakan pertambangan rakyat di atas tanah milik pribadi . 15(2)*.
- Amin, R. I., & Achmad, A. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(2), 205–220.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Baetal, B., Wardhani, D. K., & Ekawati, D. (2021). *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Dimensi Politik Hukum Konstitusi*.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(2), 137–152.
- Cahyani, A. A. F. (2024). Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Potential. : : *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11), 1–17. <https://jhlrg.rewangrencang.com>
- Cahyani, P. I. (2016). *KONFLIK NORMA PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*.
- UU No.4 Tahun 2009, Экономика Региона 49 (2009).
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).
- DIKI, Z. (n.d.). REKONTSTRUKSI HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Universitas Jambi.

- DIKI, Z. (2014). *HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. UPT. Perpustakaan.
- Erar, I., & Joesoef. (2021). Pemberian Konsesi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Kepada Investor Di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 361–379.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*.
- Harsono, B. (2007). Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. (*No Title*).
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan gagasan Amandemen Ulang*.
- Hutabarat, L. S., & Zukriadi, D. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9021–9031.
- Hylton, K. N., Rodionova, Y., & Deng, F. (2011). Church and State: An Economic Analysis. *American Law and Economics Review*, 13(2), 402–452.
- Kelsen, H. (2019). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Nusamedia.
- Kelsen, H., & Merkl, A. (2010). *Die Wiener rechtstheoretische Schule: Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross*. Verlag Österreich.
- Kurniawan, R. (2023). *Implikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Universitas Islam Indonesia.
- Manan, B. (2003). Teori dan politik konstitusi. (*No Title*).
- Maria Farida, I. (2018). *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Masyitoh, N. D. (2009). Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological

- Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*.
- Mertokusumo, S. (2006). *Metode penemuan hukum*.
- Misbach, T. M. P. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Dinamika*, 26(1), 120–135.
- Muchamad Taufiq. (2023). Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda. *Journal Equitable*, 8(2), 240–270. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>
- Muntoha, M. (2008). Otonomi Daerah Dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(2).
- Otto, J. M., Bedner, A. W., Irianto, S., & Wirastri, T. D. (2012). Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]. *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, 115–156.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta (2018).
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*. Prenada Media.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. UKI press.
- Rahardjo, S., Hukum, I., & Bakti, P. T. C. A. (2012). *Cetakan ke VII*. Bandung.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT. Presindo.
- Rondonuwu, P. M. (2023). *Teori Hukum: dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. PT.

RajaGrafindo Persada.

- Safri, H. (2017). Manajemen dan organisasi dalam pandangan Islam. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2).
- Satjipto, R. (2006). Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(1), 1.
- Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Susskind, R. (2010). Legal Informatics: A Personal Appraisal of Context and Progress. *European Journal of Law and Technology*, 1(1), 88–110.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia article 112 (2020). [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%203%20Thn%2020.pdf)
- Tumanggors, R. O. (2018). Pemahaman well-being dari perspektif Filsafat. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(1), 350.
- van Apeldoorn, L. J., Sadino, O., & Supomo. (1978). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.
- Widiyanti, N., & Sunindhia, Y. W. (1998). Koperasi perekonomian Indonesia. *Jakarta: PT Rineka Dan PT Bina Adiaksara*.
- Zukriadi, D. (2022). JCK QUO VADIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2).